BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Setelah menguraikan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, kajian teori yang mendukung penelitian, dan metode penelitian yang digunakan pada bab sebelumnya, maka bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian akan diuraikan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kegiatannya adalah melakukan produkti dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Terdapat beberapa jenis badan usaha yang diklasifikasikan berdasarkan kegiatan utama yang dijalankannya. Jenis badan usaha tersebut adalah perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri.

1. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa.

   Contoh : Kantor Akuntan, Salon, Bengkel, dan lain-lain.

2. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi.

   Contoh : Toserba, Dealer, Toko Kelontongan dan lain-lain.

3. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolahbahan baku menjadi barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut. Contoh : Pabrik sepatu, pabrik roti, garment dan lain-lain.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan sarana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dengan melakukan kerja sama antar individu yang ada di perusahaan tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan struktur organisasi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia berbentuk garis dan staf, di mana wewenang dari pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya untuk semua bidang pekerjaan bantuan. Secara garis besar struktur organisasi perusahaan-perusahaan di Indonesia terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

1. Dewan Direksi
    a. Direktur Utama
    b. Direktur Keuangan
    c. Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) dan Umum
    d. Direktur Pemasaran
    e. Direktur Operasi dan Teknik
2. Divisi Pengembangan Bisinis
3. Divisi Sekertaris Perusahaan
4. Divisi Satuan Pengawas Intern
5. Divisi Akuntansi
6. Divisi Keuangan

7. Divisi Sistem dan Teknologi Informasi
8. Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
9. Divisi Umum
10. Divisi Operasional penjualan
11. Divisi Manajemen Proyek
12. Divisi Operasi
13. Divisi Pengadaan dan Logistik
14. Divisi Produksi dan Purna Jual
15. Divisi Pengembangan Produk

Gambar struktur organisasi perusahaan tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran.

4.1.3 Uraian Tugas

Tugas-tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Direksi

   Dewan Direksi adalah suatu dewan yang memimpin sebuah usaha korporasi dan menjalankan misi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, dengan kinerja usaha yang menguntungkan, kepuasan pelanggan yang maksimal, serta tingkat pencapaian kinerja usaha dalam setiap tahap perkembangan. Dewan Direksi dapat dibantu oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. Tugas pokok Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

a. Menentukan strategi dan kebijakan umum perusahaan dalam jangka pendek,jangka menengah, dan jangka panjang.
b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan negara atau pemerintah.
c. Membina dan mengawasi performa unit kerja.
d. Mengintegrasi strategi perusahaan dengan sasaran dan performasi divisi.

Dewan Direksi dipilih dan diangkat oleh pemerintah. Dewan Direksi ini terdiri dari Direktur Utama yang membawahi Direktur Keuangan, Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) dan Umum, Direktur Pemasaran, Direktur Operasi dan Teknik.

2. Divisi Pengembangan Bisinis

   Pembentukan Divisi Pengembangan Bisnis ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Utama dalam mengelola dan menjalankan kegiatanperusahaan meliputi bidang pengembangan bisnis dan *regional nfocomm centre of excellence* (RICE).

3. Divisi Sekertaris Perusahaan Pembentukan Divisi Sekertaris Perusahaan ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Utama dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Biro Direksi dan Pelaporan Manajemen.

4. Divisi Satuan Pengawas Intern

   Pembentukan Divisi Satuan Pengawas Intern ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Utama mengawasi jalannya kegiatan perusahaan

meliputi bidang Audit Keuangan, Audit Operasi, serta bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Pengembangan Audit.

5. Divisi Akuntansi

   Pembentukan Divisi Akuntansi ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Keuangan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan, Anggaran dan Pelaporan, dan Sistem Akuntansi.

6. Divisi Keuangan

   Pembentukan Divisi Keuangan ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Keuangan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Penagihan dan Penerimaan, Strategi Pendanaan, Pendanaan Operasional, Pajak dan Asuransi serta Manajemen Aset.

7. Divisi Sistem dan Teknologi Informasi

   Pembentukan Divisi Sistem dan Teknologi Informasi ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Keuangan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Sistem Informasi manajemen serta Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi.

8. Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia

   Pembentukan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur SDM & Umum dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Pelayanan SDM dan

Remunerasi, Pengembangan Sistem SDM dan Organisasi, Pengembangan SDM dan Penilaian kinerja dan Manajemen Kualitas.

9. Divisi Umum

   Pembentukan Divisi Umum ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur SDM dan Umum dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Umum dan Rumah Tangga, Humas dan CSR/PKBL.

10. Divisi Operasional Penjualan

    Pembentukan Divisi Operasional Penjualan ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Pemasaran dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Komersial-*System* Integrator, Komersial-Pemeliharaan, Perencanaan dan Pengendalian Penjualan serta Pendukung Penjualan.

11. Divisi Manajemen Proyek

    Pembentukan Divisi Manajemen Proyek ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Pendukung Manajemen proyek, Perencanaan dan Pengendalian Material, Perencanaan dan Pengendalian Proyek dan Kualitas Proyek.

12. Divisi Operasi

    Pembentukan Divisi Operasi ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Pendukung Operasi, Instalasi, Test dan *Commissioning*, CME serta OSP.

13. Divisi Pengadaan dan Logistik

    Pembentukan Divisi Pengadaan dan Logistik ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Perencanaan dan Pengendalian Logistik, Pengadaan serta Gudang dan Distribusi.

14. Divisi Produksi dan Purna Jual

    Pembentukan Divisi Produksi dan Purna Jual ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Managed Services, Produksi dan Perbaikan, Pelayanan Spare Part, Perencanaan dan Pengendalian Produksi dan Purna Jual serta Pendukung Produksi dan Purna Jual.

15. Divisi Pengembangan Produk

    Pembentukan Divisi Pengembangan Produk ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Pengembangan Produk dan Pendukung Pengembangan Produk.

4.1.4 Aktivitas Perusahaan

Secara garis besar kegiatan usaha perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba. Tetapi disamping laba, perusahan juga harus menjaga agar tetap solvabel, artinya selalu tersedia uang tunai agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban pembayarannya. Kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut adalah :

1. Pemilik menyetorkan modal ke dalam perusahaan.
2. Kreditur memberi pinjaman kepada perusahaan.
3. Perusahaan mengolah uang atau modal menjadi aktiva produktif.
4. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa.
5. Penjual menjual barang atau jasa kepada pelanggan.
6. Perusahaan membayar kembali pinjaman bila perusahaan mempunyai kewajiban pembayaran atas pinjaman yang dilakukan.
7. Perusahaan membagi laba kepada pemilik.

Adapun kegiatan perusahaan bila berdasarkan jenis perusahaannya adalah sebagai berikut :

1) Perusahaan Jasa

Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan jasa meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pembelian

Dalam sebuah perusahaan jasa kegiatan pembelian meliputi pembelian aktiva produktif seperti pembelian bangunan, tanah, dan perlengkapan untuk disewakan, serta aktiva produktif lainnya dalam menunjang kegiatan usahanya.

b. Pengeluaran uang atau pembayaran

Pembayaran ini disebabkan oleh adanya pembelian yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. selain itu, pembayaran juga dapat timbul karena adanya keperluan lain misalnya pengembalian pinjaman bila perusahaan memiliki kewajiban pembayaran pinjaman.

c. Penjualan

Penjualan yang diberikan adalah penjualan atas jasa. Penjualan jasa ini dapat berupa penyewaan gedung, penyewaan tanah, penyewaan perlengkapan dan jasa lainnya seperti jasa pemotongan rambut dan lain sebagainya.

d. Penerimaan uang

Penjualan atas jasa akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. disamping penjualan, perusahaan akan menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman kreditur, dan sumber lainnya.

2) Perusahaan dagang

Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan dagang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a) Pembelian

Dalam sebuah perusahaan dagang kegiatan pembelian meliputi pembelian aktiva produktif, pembelian barang dagang dan jasa lain dalam rangka kegiatan usahanya.

b) Pengeluaran uang atau pembayaran

Pembayaran ini disebabkan oleh adanya pembelian yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. selain itu, pembayaran juga dapat timbul karena adanya keperluan lain misalnya pengembalian pinjaman atau membagikan laba kepada pemilik.

c) Penjualan

Penjualan dapat dilakukan secara kredit ataupun tunai. Penjualan secara kredit menimbulkan adanya piutang dagang. Pada saat penjualan, terkadang terdapat barang yang rusak sehingga perusahaan harus menerima pengembalian barang atau memberi potongan harga dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugaian atas pengembalian tersebut.

d) Penerimaan uang

Penjualan atas barang akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. disamping penjualan, perusahaan akan menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman kreditur, dan sumber lainnya.

3) Perusahaan Industri atau Manufaktur

Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan industri sama seperti siklus kegiatan perusahaan dagang hanya berbeda pada saat pembelian dan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan perusahaan manufaktur tersebut meliputi sebagai berikut :

a. Pembelian

Dalam sebuah perusahaan industri kegiatan pembelian meliputi pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong dan jasa lain dalam rangka kegiatan usahanya seperti buruh langsung.

b. Kegiatan Produksi

Kegiatan produksi yaitu proses pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi kemudian mengolah barang setengah jadi tersebut menjadi barang jadi.

c. Pengeluaran uang atau pembayaran

Pembayaran ini disebabkan oleh adanya pembelian yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. selain itu, pembayaran juga dapat timbul karena adanya keperluan lain misalnya pengembalian pinjaman atau membagikan laba kepada pemilik.

d. Penjualan

Penjualan dapat dilakukan secara kredit ataupun tunai. Penjualan secara kredit menimbulkan adanya piutang dagang. Pada saat penjualan, terkadang terdapat barang yang rusak sehingga perusahaan harus menerima pengembalian barang atau memberi potongan harga dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian atas pengembalian tersebut.

e. Penerimaan uang

Penjualan atas barang akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. disamping penjualan, perusahaan akan menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman kreditur, dan sumber lainnya.

4.2 Karakteristik Responden

Jumlah keseluruhan kuisioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 50 eksemplar. Jumlah yang kembali dan diolah sebanyak 50 eksemplar. Penyebaran kuisioner penelitian ini ditujukan kepada 50(wajib pajak badan) yang terdaftar di KPP Madya Bandung,.

Berikut disajikan profil responden berdasarkan jenis usaha, lama berdiri, omset perusahaan dan status perusahaan:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Data mengenai jenis usaha wajib pajak yang ditelitidapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis usaha	Jumlah	(%) Persentase
1.	Dagang	10	19%
2.	Jasa	27	56%
3.	Manufaktur	13	27%
Jumlah		50	100 %

Sumber :Data primer yang telah di olah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis udaha tertentu. Data yang dipilih melalui kuisioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa sebagian besar jenis usaha responden yang jenis perusahaannya dibidang jasa berjumlah 27 atau sebesar 56%. Adapun yang lainnya terdapat sebesar 19% responden dengan jenis usaha dibidang dagang, dan sebesar 27% responden yang jenis usahanya dibidang manufaktur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa .Hal ini disebabkan responden yang jenis perusahaan jasa lebih banyak jumlahnya pada saat pembagian kuisioner pada wajib pajak badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung.

2. Profil Responden Berdasarkan Lama Berdiri

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama berdirinya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Lama Berdiri

Lama Berdiri	Jumlah Responden	%
s.d 1 Tahun	0	0
1-5 Tahun	9	17%
6-10 Tahun	29	60%
> 10 Tahun	12	25%
Jumlah	50	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang lama berdiri perusahaannya 6 s.d 10 tahun berjumlah 29 responden atau sebesar 60%, >10 Tahu berjumlah 12 responden atau sebesar 25%, 1-5 tahun berjumlah 9 responden atau sebesar 17%, dan s.d 1 tahun berjumlah 0 responden atau sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah yang lama berdiri perusahaannya selama 6-10 tahun.

3. Profil Responden Berdasarkan Omset Perusahaan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Omset Perusahaan

Omset Perusahaan	Jumlah Responden	%
Rp. 0- Rp.500.000.000	0	0
Rp. 500.000.000 - Rp 1000.000.000	0	0
Rp. 1.000.000.000 - Rp.5.000.000.000	18	35%
Diatas Rp.5.000.000.000	32	67%
Jumlah	50	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa omset perusahaan wajib pajak badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang terpilih sebagai responden mayoritas beromset terbesar Diatas Rp.5.000.000.000 berjumlah 32 responden atau sebesar 67%, omset Rp. 1.000.000.000- Rp.5.000.000.000 berjumlah 18 responden atau sebesar 35%, Omset Rp. 500.000.000- Rp 1000.000.000 sebesar 0%, dan omset Rp. 0- Rp.500.000.000 sebesar 0% . Hal ini disebabkan karena responden yang omset perusahaannya

diatas Rp. 5.000.000.000 lebih banyak menjadi responden pada saat penyebaran kuisioner pada wajib pajak badan di Wilayah KPP Madya Bandung.

4. Profil Responden Berdasarkan Status Perusahaan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Status Perusahaan

Status Perusahaan	Jumlah Responden	%
PKP	50	100%
Non PKP	0	0
Jumlah	50	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa status perusahaan wajib pajak badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang terpilih sebagai responden semuanya berstatus sebagai PKP. Hal ini disebabkan karena wajib pajak badan di Wilayah KPP Madya Bandung sudah menjadi PKP.

4.3 Analisis Deskriptif

Uraian mengenai data hasil penelitian digunakan untuk memberikan gambaran kondisi objek penelitian yang diamati berdasarkan tanggapan responden terhadap setiap indikator dan variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden.

4.3.1 Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak Pada KPP Madya Bandung

Pemeriksaan Pajak adalah pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan

mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan / atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yang dilakukan variabel Pemeriksaan Pajak diukur dengan 8 indikator yaitu Integritas, Pendidikan, Pelatihan, Memeriksa di tempat Wajib Pajak, Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern, Pemeriksaan atas buku-buku,catatan-catatan,dan dokumen-dokumen, Hasil pemeriksaan kepada WP dan Sidang Penutup. Hasil penilaian responden untuk setiap indikator yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Integritas

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
1	Bagaimana sikap pemeriksa selama dilakukannya pemeriksaan	f	0	16	18	16	0	150	250	60.0%
		%	0.0	32.0	36.0	32.0	0.0			
2	Bagaimana sikap pemeriksa selama dilakukannya pemeriksaan	f	1	13	21	15	0	150	250	60.0%
		%	2.0	26.0	42.0	30.0	0.0			
3	Bagaimana sikap pemeriksa selama dilakukannya pemeriksaan	f	1	21	13	15	0	158	250	63.2%
		%	2.0	42.0	26.0	30.0	0.0			
Total Skor Integritas								458	750	61.1%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan hasil pada table di atas persentase skor tanggapan responden sikap pemeriksa selama dilakukannya pemeriksaan dikategorikan cukup baik, karena 36.0% responden menjawab sikap pemeriksa selama dilakukannya pemeriksaan bertanggung jawab, namun kurang konsisten dengan

ucapan dan tindakannya, 32.0% responden menjawab sikap pemeriksa selama dilakukannya pemeriksaan bertanggung jawab, konsisten, dan dapat dipercaya. Namun sebagian lainnya 32.0% responden menjawab sikap pemeriksa selama dilakukannya pemeriksaan tidak bertanggung jawab, tidak konsisten, tidak dapat dipercaya.Berdasarkan hasil pada table di atas sikap pemerikasa dapat dikategorikan kurang konsisten, karena 42.0% responden menjawab sikap pemeriksa konsisten, 26.0% responden menjawab sikap pemeriksa selama dilakukannya pemeriksaan konsisten, dan sebagian lainnya 30% responden menjawab sikap pemeriksa tidak konsisten.

Berdasarkan hasil pada table di atas sikap pemerikasa dapat dikategorikan dapat dipercaya, karena 42.0% responden menjawab sikap pemeriksa dapat dipercaya, 26.0% responden menjawab sikap pemeriksa selama kurang dapat dipercaya dan 30.0% responden menjawab sikap pemeriksa selama tidak dapat dipercaya.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Integritas mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{458}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 61{,}1\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Integritas berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 61,1%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa Dapat dikatakan bahwa sebagian besar WP pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung integritas pemeriksa selama dilakukannya pemeriksaan cukup baik.

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Pendidikan

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
4	Bagaimana dengan kemampuan audit yang dimiliki pemeriksa pajak	f	20	14	15	1	0	203	250	81.2%
		%	40.0	28.0	30.0	2.0	0.0			
5	Bagaimana dengan pengetahuan akuntansi yang dimiliki pemeriksa pajak	f	15	18	17	0	0	198	250	79.2%
		%	30.0	36.0	34.0	0.0	0.0			
Total Skor Pendidikan								401	500	80.2%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan hasil pada table di atas kemampuan audit yang dimiliki pemeriksa pajak dikategorikan sudah baik dimana ada 40.0% responden menjawab Sangat kompoten dan terlihat sudah sangat menguasai, dan 28.0% responden menjawab Kompoten. Berkaitan dengan pengetahuan akuntansi yang dimiliki pemeriksa pajak hasil pada table di atas atas penilaian pengetahuan pemerikasa pajak dapat dikategorikan sudah baik dimana ada 30.0% responden menjawab Sangat kompoten dan terlihat sudah sangat menguasai dan 36.0% responden menjawab Kompoten.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Pendidikan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{401}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 80{,}2\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Pendidikan berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 80,2%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa dilihat dari pendidikan pemeriksa pajak sudah memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan pemeriksaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan menjadikan wajib pajak meninfkat kepatuhannya.

Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Pelatihan

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
6	Bagaimana kemampuan pemeriksa pajak ketika dilakukannya pemeriksaan pajak	f	4	24	22	0	0	182	250	72.8%
		%	8.0	48.0	44.0	0.0	0.0			
7	Bagaimana dengan pengalaman dari pemeriksa pajak ketika dilakukannya pemeriksaan	f	7	21	21	1	0	184	250	73.6%
		%	14.0	42.0	42.0	2.0	0.0			
Total Skor **Pelatihan**								366	500	73.2%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan hasil pada table di atas kemampuan pemeriksa pajak ketika dilakukannya pemeriksaan pajak dikategorikan sudah baik dimana ada 8.0% responden menjawab sangat terlatih dan berpengalaman dalam hal pemeriksan pajak, dan 48.0% responden menjawab terlatih. Berkaitan dengan pengalaman dari pemeriksa pajak ketika dilakukannya pemeriksaan hasil pada table di atas atas penilaian pengalaman pemerikasa pajak dapat dikategorikan sudah baik dimana ada 14.0% responden menjawab Sudah sangat berpengalaman dan 42.0% responden menjawab berpengalaman.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Pelatihan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ \text{skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\%\ \text{skor aktual} = \frac{366}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

$$\%\ \text{skor aktual} = 73{,}2\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Pelatihan berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 75,4%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa pemeriksa pajak sudah memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dari hasil pelatihannnya sehinga diharapkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Memeriksa di tempat Wajib Pajak

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
8	Bagaimana dengan sikap pemeriksa pajak pada saat mencari bukti pemeriksaan pajak	f	5	17	23	5	0	172	250	68.8%
		%	10.0	34.0	46.0	10.0	0.0			
9	Bagaimana dengan sikap pemeriksa pajak pada saat mencari bukti pemeriksaan pajak	f	6	10	31	3	0	169	250	67.6%
		%	12.0	20.0	62.0	6.0	0.0			
Total Skor Memeriksa di tempat Wajib Pajak								341	500	68.2%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan hasil pada table di atas sikap pemeriksa pajak pada saat mencari bukti pemeriksaan pajak sudah baik dan berlaku sopan dimana ada 34.0% responden menjawab Baik dan 10.0% responden menjawab sangat baik dengan pemeriksaan yang dilakukan sopan. Berkaitan dengan sikap pemeriksa pajak pada saat mencari bukti pemeriksaan pajak dapat dikategorikan cukup baik dimana ada 20.0% responden menjawab membuat nyaman dan 12.0% responden menjawab sangat membuat nyaman suasana di perusahaan.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Memeriksa di tempat Wajib Pajak mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{341}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

% skor aktual = 68,2%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Memeriksa di tempat Wajib Pajakberdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 68,2%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa sikap pemeriksa pajak pada saat mencari bukti pemeriksaan pajak dinilai sudah baik meskipun belum optimal dimana masih ada yang memberikan penilaian kurang

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
10	Terkait dengan struktur dan fungsi organisasi maupun system di perusahaan,yang dilakukan pemeriksa adalah	f	1	18	21	9	1	159	250	63.6%
		%	2.0	36.0	42.0	18.0	2.0			
11	Bagaimana dengan pemeriksaan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan perusahaan	f	0	17	20	12	1	153	250	61.2%
		%	0.0	34.0	40.0	24.0	2.0			
Total Skor Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern								312	500	62.4%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan hasil pada table di atas Terkait dengan struktur dan fungsi organisasi maupun system di perusahaan,yang dilakukan pemeriksa telihat ada

42.0% responden menjawab pemeriksa pajak hanya bertanya mengenai struktur organisasi perusahaan saja dan 36.0% responden menjawab pemeriksa pajak hanya bertanya mengenai struktur organisasi perusahaan fungsi dan system di perusahaan. Berkaitan dengan pemeriksaan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan perusahaan telihat ada 40.0% responden menjawab pemeriksaan kebijakan-kebijakan terkait pajak perusahaan saja dan 34.0% responden menjawab pemeriksaan kebijakan-kebijakan terkait pajak perusahaan dan akuntansi pajaknya saja.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{312}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 62{,}4\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 62,4%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa pemeriksa pajak telah melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern meskipun belum optimal.

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Pemeriksaan atas buku-buku,catatan-catatan,dan dokumen-dokumen

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
12	Ketika dilakukan pemeriksaan atas buku-buku catatan ataupun dokumen apakah telah sesuai dengan tujuan pemeriksaan	f	1	12	27	10	0	154	250	61.6%
		%	2.0	24.0	54.0	20.0	0.0			
13	Bagaimana dengan prosedur peminjaman buku-buku catatan ataupun dokumen terkait jangka waktu pengembaliannya apakah sudah sesuai	f	1	12	24	13	0	151	250	60.4%
		%	2.0	24.0	48.0	26.0	0.0			
Total Skor Pemeriksaan atas buku-buku,catatan-catatan,dan dokumen-dokumen								305	500	61.0%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan hasil pada table di atas terkait dengan ketika dilakukan pemeriksaan atas buku-buku catatan ataupun dokumen apakah telah sesuai dengan tujuan pemeriksaan telihat ada 54.0% responden menjawab kurang sesuai dan 24.0% responden menjawab sesuai. Berkaitan dengan prosedur peminjaman buku-buku catatan ataupun dokumen terkait jangka waktu pengembaliannya apakah sudah sesuai telihat ada 48.0% responden menjawab kurang sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden

terhadap skor ideal untuk Indikator Pemeriksaan atas buku-buku,catatan-catatan,dan dokumen-dokumen mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{305}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 61{,}0\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Pemeriksaan atas buku-buku,catatan-catatan,dan dokumen-dokumen berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 61,0%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa pemeriksa pajak telah melakukan pemeriksaan atas buku-buku,catatan-catatan,dan dokumen-dokumen meskipun belum optimal.

Tabel 4.11
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
14	Bagaimana tanggapan mengenai informasi yang diberikan pemeriksa mengenai hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan	f	3	21	20	6	0	171	250	68.4%
		%	6.0	42.0	40.0	12.0	0.0			
15	Bagaimana dengan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan terkait dengan prosedur pemberitahuan pemeriksaan yang dilakukan apakah sudah sesuai	f	2	22	24	2	0	174	250	69.6%
		%	4.0	44.0	48.0	4.0	0.0			
Total Skor Hasil pemeriksaan kepada WP								345	500	69.0%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan hasil pada table di atas terkait dengan informasi yang diberikan pemeriksa mengenai hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan telihat ada 42.0% responden menjawab sesuai dan 40.0% responden menjawab kurang sesuai. Berkaitan dengan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan terkait dengan prosedur pemberitahuan pemeriksaan yang dilakukan apakah sudah sesuai telihat ada 48.0% responden menjawab kurang sesuai.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{345}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 69{,}0\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 69,0%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%-84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP telah dilakukan meskipun belum optimal.

Tabel 4.12
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Sidang Penutup

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
16	Bagaimana hasil keputusan ketika sidang penutup pemeriksaan pajakdilakukan	f	3	21	17	9	0	168	250	67.2%
		%	6.0	42.0	34.0	18.0	0.0			
17	Bagaimana dengan prosedur sidang penutup yang dilakukan setelah pemeriksaan	f	2	27	13	7	1	172	250	68.8%
		%	4.0	54.0	26.0	14.0	2.0			
Total Skor Sidang Penutup								340	500	68.0%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan hasil pada table di atas terkait dengan hasil keputusan ketika sidang penutup pemeriksaan pajakdilakukan telihat ada 42.0% responden menjawab sesuai dan 6.0% responden menjawab sangat sesuai. Berkaitan

dengan prosedur sidang penutup yang dilakukan setelah pemeriksaan telihat ada 54.0% responden menjawab sesuai.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Sidang Penutup mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{340}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 68{,}0\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Sidang Penutupberdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 68,0%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%- 84%).

Untuk mendapatkan gambaran Pemeriksaan Pajak secara menyeluruh di KPP Madya Bandung dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas enam indikator dan hasilnya ditangkum pada table berikut ini:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

No	Indikator	Total Skor	Skor Ideal	%	Kriteria
1	Integritas	458	750	61.1%	Cukup
2	Pendidikan	401	500	80.2%	Baik
3	Pelatihan	366	500	73.2%	Baik
4	Memeriksa di tempat Wajib Pajak	341	500	68.2%	Baik
5	Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern	312	500	62.4%	Cukup
6	Pemeriksaan atas buku-buku,catatan-catatan,dan dokumen-dokumen	305	500	61.0%	Cukup
7	Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP	345	500	69.0%	Baik
8	Sidang Penutup	340	500	68.0%	Baik
	Total	2868	4250	67.5%	Cukup

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak di KPP Madya Bandungdapat dikatakan baik. Dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak yang dilakukan wajib pajak di KPP Madya Bandung sudah dilakukan. Meskipun belum optimal serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan / atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.2 Analisis Deskriptif Manajemen Laba Pada KPP Madya Bandung

Manajemen Laba dapat didefinisikan sebagai suatu interverensi manajemen dengan tujuan tertentu dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan sepihak. Dalam penelitian yang dilakukan variabel Manajemen Laba diukur dengan 4 indikator yaitu *Taking a bath, Income minimization, Income maximization* dan *Income smooting.*

Hasil penilaian responden untuk setiap indikator yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 4.14
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator *Taking a bath*

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
18	Pemeriksa dalam mengevaluasi laporan keuangan harus memeriksa laporan keuangan periode sebelumnya, apalagi jika sangat ekstrim terhadap periode lalu	f	0	1	29	17	3	128	250	51.2%
		%	0.0	2.0	58.0	34.0	6.0			
19	Pada laporan keuangan klien, pemeriksa harus dapat melihat dan menganalisis apakah ada kecendrungan melakukan manajemen laba	f	1	7	30	11	1	146	250	58.4%
		%	2.0	14.0	60.0	22.0	2.0			
Total Skor *Taking a bath*								274	500	54.8%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Hasil tanggapan responden dalam hal Pemeriksa dalam mengevaluasi laporan keuangan harus memeriksa laporan keuangan periode sebelumnya, apalagi jika sangat ekstrim terhadap periode lalu pada umumnya cukup dilakukan yaitu sebesar 58.0%. Dalam hal pemeriksa harus dapat melihat dan menganalisis apakah ada kecendrungan melakukan manajemen laba pada laporan keuangan klien, umumnya menyatakan biasa-biasa saja (netral) yaitu sebesar 60.0%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator *Taking a bath* mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{274}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 54{,}8\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator *Taking a bath* berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 54,8%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup (berada pada interval 52%- 68%).

Tabel 4.15
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator *Income minimization*

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden 5	4	3	2	1	Total Skor	Skor Ideal	% Skor
20	Menurut anda, apakah pemeriksa harus dapat mengetahui apa saja tindakan manajemen laba tersebut. Apabila diketahui mengapa laporan laba lebih tinggi dari periode sebelumnya	f	0	8	27	10	5	138	250	55.2%
		%	0.0	16.0	54.0	20.0	10.0			
21	Pemeriksa tidak perlu memahami mengapa laporan mengalami fluktuasi yang sama hampir setiap bulannya	f	0	10	27	10	3	144	250	57.6%
		%	0.0	20.0	54.0	20.0	6.0			
Total Skor *Income minimization*								282	500	56.4%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Hasil tanggapan responden dalam hal pemeriksa harus dapat mengetahui apa saja tindakan manajemen laba tersebut, apabila diketahui mengapa laporan laba lebih tinggi dari periode sebelumnya, pada umumnya cukup dilakukan yaitu sebesar 54.0%. Dalam hal Pemeriksa tidak perlu memahami mengapa laporan mengalami fluktuasi yang sama hampir setiap bulannya, umumnya menyatakan biasa-biasa saja (netral) yaitu sebesar 54.0%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Income minimization mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{282}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 56{,}4\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator *Income minimization* berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 56,4%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa *Income minimization* dinilai perlu diketahui agar dapat dinilai terjadi nya manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam pelaporan keuangannya.

Tabel 4.16
Distribusi Jawaban Responden mengenai *Income maximization*

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
22	Pemeriksa harus mengetahui apa saja motivasi yang dilakukan manajer perusahaan sebagai orang yang mempunya andil besar dalam laporan keuangan	f	1	12	18	14	5	140	250	56.0%
		%	2.0	24.0	36.0	28.0	10.0			
23	Political motivasion menyebabkan perusahaan melakukan manajemen laba	f	2	19	17	12	0	161	250	64.4%
		%	4.0	38.0	34.0	24.0	0.0			
Total Skor *Income maximization*								301	500	60.2%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Hasil tanggapan responden dalam hal Pemeriksa perlu memahami mengapa laporan mengalami fluktuasi yang sama hampir setiap bulannya, pada umumnya menilai cukup perlu dilakukan yaitu sebesar 36.0%. Dalam hal Political motivasion menyebabkan perusahaan melakukan manajemen laba, umumnya menyatakan biasa-biasa saja (netral) yaitu sebesar 34.0%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator *Income maximization* mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{301}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 60{,}2\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator *Income maximization* berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 60,2%. kategori cukup (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa *Income maximization* dinilai perlu diketahui agar dapat dinilai terjadi nya manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam pelaporan keuangannya.

Tabel 4.17
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator *Income smooting*

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden 5	4	3	2	1	Total Skor	Skor Ideal	% Skor
24	Penghematan pajak menjadi motivasi perusahaan melakukan manajemen laba	f	3	24	14	7	2	169	250	67.6%
		%	6.0	48.0	28.0	14.0	4.0			
25	Pemeriksa harus dapat mengetahui mengapa bonus yang diterima CEO meningkat, bersamaan dengan pergantian CEO	f	1	15	24	9	1	156	250	62.4%
		%	2.0	30.0	48.0	18.0	2.0			
26	Untuk menaikan harga saham, perusahaan yang akan go public cenderung melakukan manajemen laba	f	3	13	24	6	4	155	250	62.0%
		%	6.0	26.0	48.0	12.0	8.0			
Total Skor *Income smooting*								480	750	64.0%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Hasil tanggapan responden dalam hal Penghematan pajak menjadi motivasi perusahaan melakukan manajemen laba, pada umumnya menilai hal tersebut dapat terjadi, responden 48.0% menyatkan setuju. Dalam hal Pemeriksa harus dapat mengetahui mengapa bonus yang diterima CEO meningkat, bersamaan dengan pergantian CEO, umumnya menyatakan biasa-biasa saja (netral) yaitu sebesar 48.0%. Dalam hal untuk menaikan harga saham, perusahaan yang akan go public cenderung melakukan manajemen laba, umumnya menyatakan biasa-biasa saja (netral) yaitu sebesar 48.0%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator *Income smooting* mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{480}{50 \times 5 \times 3} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 64{,}0\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator *Income smooting* berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 64,0%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup (berada pada interval 52%- 68%).

Untuk mendapatkan gambaran Manajemen Laba secara menyeluruh di KPP Madya Bandung dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas lima indikator dan hasilnya ditangkum pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Manajemen Laba

No	Indikator	Total Skor	Skor Ideal	%	Kriteria
1	*Taking a bath*	274	500	54.8%	Cukup
2	*Income minimization*	282	500	56.4%	Cukup
3	*Income maximization*	301	500	60.2%	Cukup
4	*Income smooting*	480	750	64.0%	Cukup
	Total	1337	2250	59.4%	Cukup

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Laba di KPP Madya Bandung dinilai dapat terjadi meskipun tidak terlihat secara terang-terangan sebagai suatu interverensi manajemen dengan tujuan tertentu dalam proses eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan sepihak yang dinilai dari *Taking a bath*, *Income minimization, Income maximization* dan *Income smooting.*

4.3.3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Madya Bandung

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan variabel Kepatuhan Wajib pajak Badan diukur dengan 4 indikator yaitu Aspek ketepatan waktu, Aspek Income atau penghasilan Wajib Pajak, Aspek pengenaan sanksi dan Aspek pembayaran dan kewajiban pembukuan. Berikut dapat diuraikan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator yang digunakan.

Tabel 4.19
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Aspek ketepatan waktu

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
27	WP mengetahui tanggal penyampaian SPT	f	0	3	23	14	10	119	250	47.6%
		%	0.0	6.0	46.0	28.0	20.0			
28	WP selalu menyampaikan SPT sesuai tanggal yang ditentukan	f	1	17	22	10	0	159	250	63.6%
		%	2.0	34.0	44.0	20.0	0.0			
29	SPT yang di isi WP sudah lengkap	f	2	10	30	8	0	156	250	62.4%
		%	4.0	20.0	60.0	16.0	0.0			
Total Skor Aspek ketepatan waktu								434	750	57.9%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Hasil tanggapan responden dalam hal ketepatan waktu, WP dinilai kurang mengetahui tanggal penyampaian SPT dalam menyampaikan SPT pada KPP Madya Bandung. Pada umumnya wajib pajak yang menyampaikan SPT dinilai kurang mengetahui tanggal penyampaian SPT yaitu sebesar 46.0%. Dalam hal ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT pada KPP Madya Bandung pada umumnya hanya sebagian wajib pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu yaitu sebesar 34.0%. Sebagian kecil Wajib Pajak yang menyampaikan SPT yaitu sebesar 44.0% dinilai responden belum menyampaikan SPT tepat waktu. Dan dalam pengisian SPT hanya sebagian wajib pajak yang mengisi dengan lengkap yaitu sebesar 20.0%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Aspek ketepatan waktu mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{434}{50 \times 5 \times 3} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 57{,}9\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Aspek ketepatan waktu berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 57,9%. yang diperoleh masuk kategori cukup (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa secara umum dapat dijelaskan bahwa permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan

SPT sudah cukup baik dikarenakan wajib pajak sudah cukup tepat waktu dalam menyampaikan SPTnya meskipun belum maksimal hasilnya.

Tabel 4.20
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Aspek Income atau penghasilan Wajib Pajak

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
30	Kesesuaian pajak yang disetorkan dengan jumlah pajak terutang	f	11	19	20	0	0	191	250	76.4%
		%	22.0	38.0	40.0	0.0	0.0			
32	Kesesuaian pajak yang disetorkan dengan tarif	f	5	19	26	0	0	179	250	71.6%
		%	10.0	38.0	52.0	0.0	0.0			
32	Menemukan WP yang salah menghitung pajak	f	2	23	19	6	0	171	250	68.4%
		%	4.0	46.0	38.0	12.0	0.0			
Total Skor Aspek Income atau penghasilan Wajib Pajak								541	750	72.1%

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Hasil tanggapan responden dalam hal Kesesuaian pajak yang disetorkan dengan jumlah pajak terutang, WP dinilai menyampaian pajak yang disetorkan dengan jumlah pajak terutang sudah sesuai. Pada umumnya wajib pajak yang menyampaikan SPT dinilai sesuai yaitu sebesar 38.0% dan sangat sesuai 22.0%. Dalam hal Kesesuaian pajak yang disetorkan dengan tarif pada KPP Madya Bandung sebagian wajib pajak dinilai menyampaikan pajak yang disetorkan sesuai dengan tarif yaitu sebesar 38.0%. Sebagian menyatakan jarang menemukan WP yang tidak melapor tepat waktu yaitu sebesar 38.0%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor

ideal untuk Indikator Aspek Income atau penghasilan Wajib Pajak mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{541}{50 \times 5 \times 4} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 72{,}1\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Aspek Income atau penghasilan Wajib Pajak berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 75,4%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa kepatuhan dalam menghitung pajak sesuai *Income* atau penghasilan WP dinilai sudah baik meskipun belum optimal.

Tabel 4.21
Distribusi Jawaban Responden mengenai Aspek pengenaan sanksi

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
33	Kapan WP menyetor pajak?	f	4	14	26	4	2	164	250	65.6%
		%	8.0	28.0	52.0	8.0	4.0			
34	Menemukan WP yang tidak menyetor tepat waktu	f	3	17	25	5	0	168	250	67.2%
		%	6.0	34.0	50.0	10.0	0.0			
35	Kapan WP melapor pajak	f	6	16	24	4	0	174	250	69.6%
			12.0	32.0	48.0	8.0	0.0			
36	. Menemukan WP yang tidak melapor tepat waktu	f	5	13	29	3	0	170	250	68.0%
		%	10.0	26.0	58.0	6.0	0.0			
Total Skor Aspek pengenaan sanksi								676	1000	67.6%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Responden (52.0%) menanggapi kepatuhan wajib pajak dalam menyetor pajak cukup baik karena diberikan pada tenggat waktu. Dalam hal menemukan

WP yang tidak menyetor tepat waktu, responden (50.0%) menanggapi jarang menemukan sehingga ini memberikan gambaran kepatuhan wajib pajak dalam menyetor pajak cukup baik. Responden (48,0%) menanggapi kepatuhan wajib pajak dalam melapor pajak cukup baik karena dilakukan pada tenggat waktu. Dalam hal menemukan WP yang tidak melapor tepat waktu, responden (58.0%) menanggapi jarang menemukan sehingga ini memberikan gambaran kepatuhan wajib pajak dalam melapor pajak cukup baik.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Aspek pengenaan sanksi mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{676}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 67{,}6\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Aspek pengenaan sanksi berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 67,6%. yang diperoleh masuk kategori cukup (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa secara umum dapat dijelaskan bahwa permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan pengenaan sanksi dalam menyampaikan SPT sudah cukup baik.

Tabel 4.22
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Aspek pembayaran dan kewajiban pembukuan

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
37	Bagaimana tanggapan anda mengenai aspek pembayaran,dan aspek kewajiban pembukuan didalam kepatuhan perpajakan	f	0	14	12	17	7	133	250	53.2%
		%	0.0	28.0	24.0	34.0	14.0			
38	Bagaimana aspek pembayaran dalam kewajiban kepatuhan perpajakan pada saat ini	f	9	23	18	0	0	191	250	76.4%
		%	18.0	46.0	36.0	0.0	0.0			
Total Skor Aspek pembayaran dan kewajiban pembukuan								324	500	64.8%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Responden (28.0%) menanggapisetuju mengenai aspek pembayaran,dan aspek kewajiban pembukuan didalam kepatuhan perpajakan sebagai tindakan tegas dari pemerintah kepada wajib pajak nakal dan dalam hal aspek pembayaran dalam kewajiban kepatuhan perpajakan pada saat ini, responden (46.0%) sudah baik.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Aspek pembayaran dan kewajiban pembukuan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{324}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 64{,}8\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Aspek pembayaran dan kewajiban pembukuan berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 64,8%. yang diperoleh masuk kategori cukup (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa Aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan dinilai cukup tepat dalam kewajiban kepatuhan perpajakan sebagai tindakan tegas dari pemerintah kepada wajib pajak nakal.

Untuk mendapatkan gambaran Kepatuhan Wajib pajak Badan secara menyeluruh di KPP Madya Bandung dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas lima indikator dan hasilnya ditangkum pada tabel berikut ini

Tabel 4.23
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib pajak Badan

No	Indikator	Total Skor	Skor Ideal	%	Kriteria
1	Aspek ketepatan waktu	434	750	57.9%	Cukup
2	Aspek Income atau penghasilan Wajib Pajak	541	750	72.1%	Tinggi/Baik
3	Aspek pengenaan sanksi	676	1000	67.6%	Cukup
4	Aspek pembayaran dan kewajiban pembukuan	324	500	64.8%	Cukup
	Total	1975	3000	65.8%	Cukup

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Melalui tabel diatas dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden atas keempat indikator yang membentuk kepatuhan Wajib Pajak badan sebesar 65.8% termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini berarti meskipun Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung cukup memenuhi kewajibannya

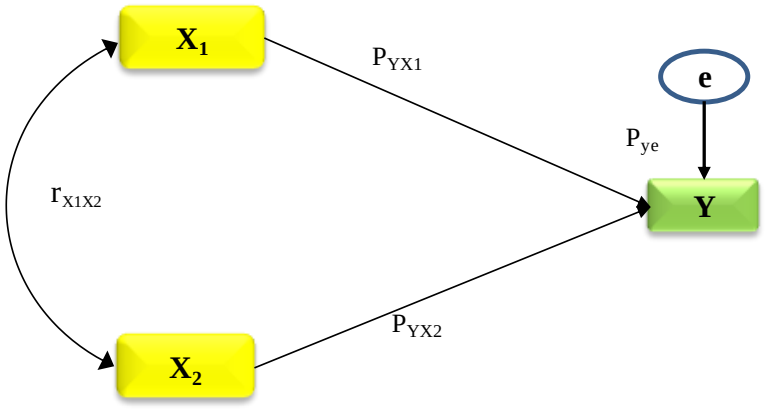
namun kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

4.4 Analisis Verifikatif

4.4.1 Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Manajemen Laba dan Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pada bagian ini setelah dijelaskan hasil untuk objek penelitian yang diteliti berdasarkan data tanggapan responden, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam pengujian hipotesis akan dilihat pengaruh Pemeriksaan Pajak dan pengaruh Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wp Badan. Dugaan penelitian adalah Semakin baik Pemeriksaan Pajak dan semakin rendah Manajemen laba akan berdampak kepada Kepatuhan Wp Badan yang diharapkan juga akan semakin meningkat.

Data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis)* sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan. Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1
Diagram Jalur Penelitian

Gambar diagram jalur dapat diformulasikan kedalam 2 bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

Y = PYX1X1 + PYX2X2 + E1

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wp Badan

X1 = Pemeriksaan Pajak

X2 = Manajemen Laba

PYX = Koefisien jalur Pemeriksaan Pajak terhadap Manajemen Laba

PYX = Koefisien jalur Pemeriksaan Pajak terhadap Manajemen Laba

E = Pengaruh faktor lain

Data yang dikumpulkan dari kuisioner yang mempunyai skala pengukuran ordinal. Untuk memenuhi syarat data yang digunakan sekurang-kurangnya mempunyai tingkat pengukuran interval, data hasil kuesioner terlebih dahulu ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI). Hasil perhitungan skor data variabel X dan Y setelah

ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) dapat dilihat pada lampiran.

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan dari data yang telah dinaikkan skala pengukurannya menjadi skala ukur interval dan dihitung total skor untuk setiap Pemeriksaan Pajak (X1), Manajemen Laba (X2) dan Kepatuhan Wp Badan (Y), selanjutnya dhitung nilai korelasi antar variabel dengan korelasi Pearson (*Product Momment*). Nilai koefisien korelasi menunjukkan keeratan hubungan antar variabel yang diteliti.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 18, didapat koefisien korelasi variabel Pemeriksaan Pajak (X1), Manajemen Laba (X2) dan Kepatuhan Wp Badan (Y), sebagai berikut:

Tabel 4.24
Hasil Korelasi

Correlations[a]

		Pemeriksaan Pajak (X1)	Manajemen Laba (X2)	Kepatuhan Wp Badan (Y)
Pemeriksaan Pajak (X1)	Pearson Correlation	1	-.473**	.777**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000
Manajemen Laba (X2)	Pearson Correlation	-.473**	1	-.654**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000
Kepatuhan Wp Badan (Y)	Pearson Correlation	.777**	-.654**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
a. Listwise N=50

Diperoleh hasil perhitungan korelasi Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib pajak Badan sebesar 0,777 dan masuk dalam kategori kuat atau erat. Arah hubungan positif antara Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib pajak Badan

menujukkan bahwa Pemeriksaan Pajak yang baik akan diikuti dengan peningkatan Kepatuhan Wajib pajak. Kemudian hubungan antara Manajemen Laba (X_2) dengan Kepatuhan Wajib pajak Badan (Y) sebesar -0,654 termasuk dalam kategori kuat dengan arah positif. Arah hubungan negatif antara Manajemen Laba dengan Kepatuhan Wajib pajak Badan menujukkan bahwa Manajemen Laba yang tinggi akan diikuti dengan penurunan Kepatuhan Wajib pajak.

Pada model struktural yang diteliti variabel Pemeriksaan Pajak (X_1) dan Manajemen Laba (X_2) merupakan variabel independen (eksogenus variabel) dan Kepatuhan Wp Badan sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Untuk menguji pengaruh Pemeriksaan Pajak (X_1) dan Manajemen Laba (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan langkah-langkah perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Menghitung Koefisien Jalur

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18.0 for windows* diperoleh koefisien jalur Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wp Badan sebagai berikut:

Tabel 4.25
Koefisien Jalur Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.851	4.720		4.841	.000
	Pemeriksaan Pajak (X1)	.401	.060	.602	6.740	.000
	Manajemen Laba (X2)	-.424	.102	-.370	-4.140	.000

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22.851	4.720		4.841	.000
	Pemeriksaan Pajak (X1)	.401	.060	.602	6.740	.000
	Manajemen Laba (X2)	-.424	.102	-.370	-4.140	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wp Badan (Y)

Nilai koefisien jalur Pemeriksaan Pajak (X1) dan Manajemen Laba (X2) terhadap Kepatuhan Wp Badan (Y) ditunjukan oleh nilai *standardized coefficients* pada tabel 4. Koefisien jalur yang diperoleh untuk Pemeriksaan Pajak (P_{YX1}) sebesar 0,602 merupakan bobot pengaruh langsung variabel Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wp Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung dan Koefisien jalur Manajemen Laba (P_{YX2}) sebesar -0,370 merupakan bobot pengaruh langsung variabel Manajemen Laba (X2) terhadap Kepatuhan Wp Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung .

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Melalui koefisien jalur Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung koefisien determinasi, yaitu besar kontribusi/pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan secara bersama-sama. Koefisien determinasi didapat dari hasil perkalian koefisien jalur dengan korelasi variabel independen dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2_{yx_1x_2} = \begin{bmatrix} 0,602 & -0,370 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,777 \\ -0,654 \end{bmatrix}$$

Selain pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wp Badan, terdapat pengaruh variabel lain (residu). Besar koefisien jalur untuk faktor lain yang tidak masuk dalam spesifikasi adalah

$$P_{Y\varepsilon} = \sqrt{1 - R^2_{yx_1x_2}} = \sqrt{1 - 0,709} = 0,539.$$

Hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18.0 for windows* untuk nilai koefisien determinasi Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wp Badan adalah sebagai berikut

Tabel 4.26
Koefisien Determinasi Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bandung

Model Summary

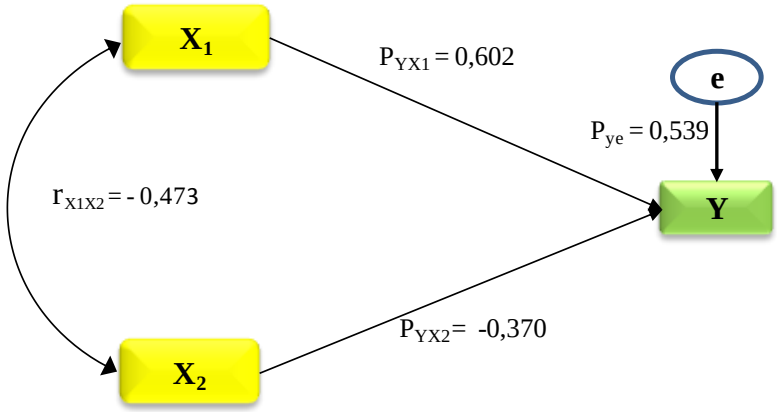
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.842[a]	.709	.697	3.26840

a. Predictors: (Constant), Manajemen Laba (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

Nilai koefisien determinasi merupakan besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba memberikan pengaruh sebesar 70,9% terhadap Kepatuhan Wp Badan pada KPP Madya Bandung.Hal ini berarti

jika Pemeriksaan Pajak lebih baik dan Manajemen Laba menurun dalam pelaksanaannya maka akan meningkatkan Kepatuhan Wp Badan pada KPP Madya Bandung. Dan sisanya sebesar 29,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Pemeriksaan Pajak .

Secara visual jalur dari Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 4.2
Diagram Dan Koefisien Jalur X1 dan X2

Melalui diagram jalur tersebut selanjutnya dihitung besar pengaruh masing-masing variabel Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung sebagai berikut

4.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung

Secara langsung Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung berpengaruh positif

(Artinya Pemeriksaan Pajak yang baik akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Oleh karena itu Petugas pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak harus terus berupaya melakukan pemeriksaan, salah satu upayanya dengan menggiatkan penelisikan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap perusahaan yang melakukan manajemen laba yang merekayasa laba sehingga meminimalkan pajak. Banyaknya perusahaan yang melakukan manajemen laba, tingkat kepatuhan perpajakan pun semakin rendah, oleh karenanya pemerintah harus tegas dalam melakukan penelisikan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Pemeriksaan pajak di KPP Madya Bandung sudah berjalan baik meskipun belum optimal terutama pada integritas, melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern, dan Pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen

4.4.3 Pengaruh Manajemen Laba terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung

Pengaruh langsung Manajemen Laba terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung berpengaruh negatif Artinya Manajemen Laba yang kecil (rendah) akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Oleh sebab itu Banyaknya perusahaan yang melakukan manajemen laba, tingkat kepatuhan perpajakan pun semakin rendah oleh karenanya pemerintah harus tegas dalam melakukan penelisikan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Manajemen laba masih dilakukan wajib pajak badan di KPP Madya Bandung dalam upaya suatu interverensi manajemen dengan tujuan tertentu dalam proses

penyusunan laporan keuangan eksternal untuk memeperoleh beberapa keuntungan sepihak yang dinilai dari *Taking a bath*, *Income minimization, Income maximization* dan *Income smooting.*

4.4.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayana Pajak Madya Bandung

Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bandung. Hal ini berarti jika Pemeriksaan Pajak lebih baik dan Manajemen Laba menurun dalam pelaksanaannya maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bandung. Dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Pemeriksaan Pajak. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh akan kepatuhan perpajakannya, dikarenakan seringkali ditemukan masih banyaknya perusahaan yang melakukan penyusutan laba, dan melaporkan SPT secara tidak jujur. Kepatuhan Wajib Pajak badan termasuk dalam kategori cukup. Hal ini berarti meskipun Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung cukup memenuhi kewajibannya namun kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung masih belum optimal dalam pelaksanaannya, hal ini bisa dinilai dari aspek ketepatan waktu, aspek income atau penghasilan wajib pajak, aspek pengenaan sanksi, dan aspek pembayaran dan kewajiban pembukuan.

Besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari masing-masing variabel dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.27
Besar Pengaruh Langsung dan tidak Langsung X1 dan X2 terhadap Y

Variabel	P_{YXi}	Pengaruh Langsung	Pengaruh melalui		Total Pengaruh
			X_1	X_2	
X_1	0.602	36.2%	-	10.5%	46.7%
X_2	-0.370	13.7%	10.5%	-	24.2%
Pengaruh Keseluruhan					70,9%

Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan apakah Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung baik secara bersama-sama maupun secara parsial, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian dimulai dari pengujian secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan pengujian secara parsial.

a. Pengujian Koefisien Jalur Secara Bersama-sama.

Untuk mengetahui kebermaknaan pengaruh dari variabel yang dihipotesiskan selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis statistik dengan menggunakan statitik uji F untuk pengaruh secara bersama-sama. Untuk menguji apakah Pemeriksaan pajak dan Manajemen laba berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pajak secara statistik hipotesis dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut :

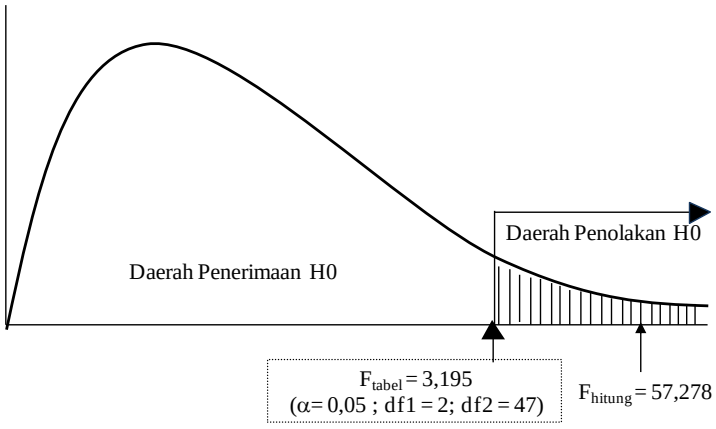
$H_0 : P_{YX1} = P_{YX2} = 0$ Pemeriksaan pajak dan Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

$H_1 : P_{YXi} \neq 0$ Pemeriksaan pajak dan Manajemen laba berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

Untuk α penelitian sebesar = 0,05, batas dinyatakan uji signifikan untuk uji simultan adalah F_{tabel} dengan derajat bebas db_1 =2 dan db_2 = 47 sebesar 3,195. Nilai F_{hitung} diperoleh sebesar 71,570 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$F = \frac{(n-k-1)\times R^2_{Y(X_1X_2)}}{k\times(1-R^2_{Y(X_1X_2)})} = \frac{(50-2-1)\times 0,709}{2\times(1-0,709)} = 57,278$$

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis (hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}) pada pengujian parsial dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan H_0 sebagai berikut :



Gambar 4.3
Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Siultan X_1 dan X_2 terhadap Y

Pada gambar 4.3 dapat dilihat F_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho karena F_{hitung} = 57,278 lebih besar dari F_{tabel} = 3,195 maka H0 ditolak dan dapat simpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan

Pajak Madya Bandung

Besarnya kontribusi atau pengaruh dari Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung sebesar 70,9%, sedangkan sisanya sebesar 29,1% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel tersebut.

b. Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial

Dari hasil pengujian secara bersama-sama disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan> Selanjutnya dilakukan pengujian parsial untuk melihat variabel mana saja diantara kedua variabel independen, yaitu Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Laba berpengaruh terhadap Kepatuhan Wp Badan pada KPP Madya Bandung.

Untuk menguji koefisien jalur dari masing-masing variabel eksogen tersebut digunakan uji t. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/ penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai t_{tabel} dengan taraf kesalahan 5% dan db = n–k–1 = 50-2-1 = 47 adalah 2,012.

a) Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Untuk menguji Pemeriksaan Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_{02} : P_{YX1} = 0$ Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bandung

$Ha_2 : P_{YX1} \neq 0$ Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bandung

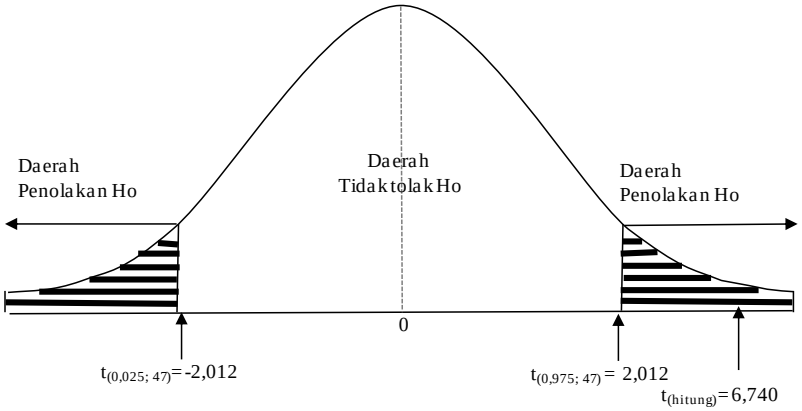
Untuk menguji hipotesisi diatas digunakan uji t dengan formula sebagai berikut:

$$t = \frac{P_{YX_1}}{\sqrt{\frac{\left(1 - R^2_{yx_1x_2}\right) \times C_{11}}{n-k-1}}}$$

$$t = \frac{0,602}{\sqrt{\frac{(1-0,709) \times 1,288}{50-2-1}}} = 6,740$$

Hasil perhitungan nilai t-hitung untuk variabel Pemeriksaan Pajak (X_1) diperoleh sebesar 6,740 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,000.

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis (hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}) pada pengujian parsial dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan H_0 sebagai berikut :



Gambar 4.4
Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Parsial Y terhadap Z

Pada gambar 4.4 dapat dilihat t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho karena diperoleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (t_{hitung} = 6,740 > t_{tabel} = 2,012). Keputusan uji adalah menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,000) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05. Artinya kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wp Badan signifikan sangat kecil % atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% (α = 0,05) sehingga keputusan uji adalah menolak H0.

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan pada KPP Madya Bandung.

b) Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan pada KPP Madya Bandung

Untuk menguji Manajemen Laba memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wp Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung,

maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

H_{02} :$P_{YX2} = 0$ Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bandung

Ha_2 : $P_{YX2} \neq 0$ Manajemen Laba berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bandung

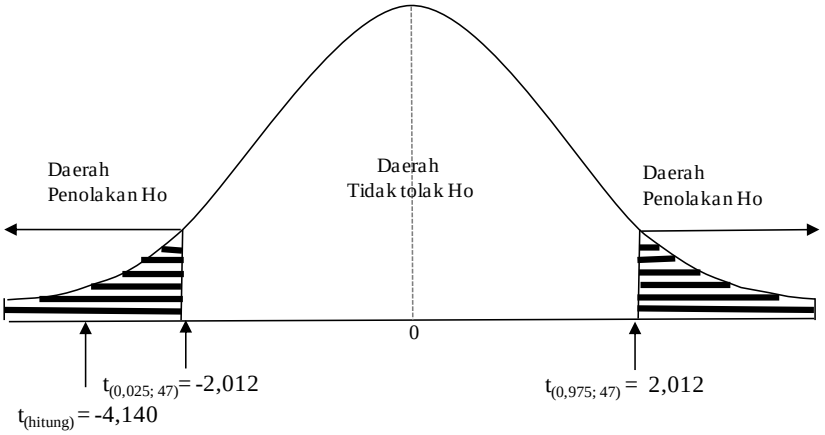
Untuk menguji hipotesis diatas digunakan uji t dengan formula sebagai berikut:

$$t = \frac{P_{YX_1}}{\sqrt{\frac{\left(1 - R^2_{yx_1x_2}\right) \times C_{11}}{n-k-1}}}$$

$$t = \frac{-0,370}{\sqrt{\frac{(1-0,709) \times 1,288}{50-2-1}}} = -4,140$$

Hasil perhitungan nilai t-hitung untuk variabel Manajemen Laba (X_2) diperoleh sebesar -4,140 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,000.

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis (hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}) pada pengujian parsial dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan H_0 sebagai berikut :



Gambar 4.5
Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Parsial X_2 terhadap Y

Pada gambar 4.5 dapat dilihat t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho karena diperoleh nilai t-hitung lebih kecil dari -t-tabel ($t_{hitung} = -4,140 < -t_{tabel} = -2,012$). Keputusan uji adalah menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,000) yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Artinya kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan signifikan sangat kecil atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) sehingga keputusan uji adalah menolak H0.

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa Manajemen Laba berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan pada KPP Madya Bandung.